

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa Negara telah menyadari betapa pentingnya mitigasi akan deforestasi dalam pengurangan emisi di udara serta menawarkan konsep baru dalam mitigasi perubahan iklim. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) merupakan konsep yang ditawarkan dalam *Bali Action Plan* di COP ke-13, Bali. REDD mendapatkan sambutan yang cukup baik terutama oleh Pemerintah Indonesia. Namun, meskipun sudah melewati beberapa tahun negosiasi masih saja belum dapat menetapkan skema yang tepat dan jelas untuk melaksanakannya. Hal tersebut juga dipicu dengan timbulnya isu yang menyatakan bahwa hutan relative terdapat lebih banyak di Negara-negara berkembang, dan mereka belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan mengurangi emisi melalui program REDD tanpa ada sentuhan atau bantuan dari Negara-negara maju.

Pemerintah Indonesia melalui pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan ikut turut serta dalam melakukan pengurangan emisi sebesar 26% dari tingkat *bussiness-as-usual* dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan dari luar pada tahun 2020. Pemerintah Norwegia menilai bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki keberanian yang kuat dengan telah menentukan target yang besar diantara Negara-negara berkembang lainnya. Maka

dari itu, Norwegia ingin mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk merealisasi komitmen tersebut.

Pada tahun 2010 Indonesia menandatangani Surat Niat atau *Letter of Intent* dengan Norwegia yang menghasilkan moratorium hutan di Indonesia selama tahun 2011-2013. Dalam LoI tersebut tertera 3 fase yang dijadikan sebagai kerangka kerja REDD+ di Indonesia. Diantaranya adalah Fase Pertama (Persiapan), Fase Kedua (Transformasi) dan yang terakhir adalah Fase Ketiga (Kontribusi untuk diverifikasi dari pengurangan emisi). Setiap fase tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, jangka waktu yang diperlukan untuk Fase Persiapan adalah dari tahun 2010-2011, Fase Transformasi yaitu dari tahun 2011-2013 dan di fase terakhir atau Fase Kontribusi akan dilaksanakan di tahun 2014 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Sesuai dengan persyaratan yang tertera di dalam LoI, Pemerintah Indonesia melalui sidang cabinet pada tanggal 23 Desember 2010 telah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dimana akan menjadi provinsi pertama dalam target REDD+ di Indonesia. Pemerintah Norwegia, pemerintah pusat Republik Indonesia dan dibantu oleh masyarakat local Kalimantan Tengah, para Organisasi Lingkungan dan juga pemerintah daerah Kalimantan Tengah saling bahu-membahu merealisasikan setiap fase yang sudah dirancang. Dari data yang diperoleh oleh penulis telah ada setidaknya 70 desa dari 7 Kabupaten yang tersebar di Kalimantan Tengah yang dijadikan target REDD+. Selain provinsi percontohan, pada *Letter of*

Intent juga mengatakan bahwa harus ada pembentukan lembaga REDD+ dan pembentukan system MRV, para pihak yang bertanggung jawab dalam REDD+ terutama pemerintah daerah telah mempersiapkan Kelompok Kerja yang bertugas memonitor, melaporkan serta melaksanakan REDD+. Kelompok kerja tersebut membentuk tim yang disebut sebagai Satuan Tugas REDD+, dimana mereka bertugas untuk merealisasikan program REDD+ dengan lebih terorganisir. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan mengurangnya emisi Indonesia di tahun 2009-2013 sebanyak kurang lebih 4,22% dari tahun 2004-2008.

Banyak pihak yang meragukan kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Karena pada kenyataannya Pemerintah Indonesia dan terlebih Pemerintah Daerah serta masyarakat local yang banyak melakukan pengurangan emisi tersebut. Hal tersebut menimbulkan pendapat bahwa Indonesia lagi-lagi menjadi budak di negeri sendiri, tetapi di balik setiap pemikiran negative tersebut masih tersimpan beberapa harapan yang menjadi strategi Indonesia dalam bidang Lingkungan di dunia. Berlandaskan sukarela, Indonesia tetap aktif dalam program REDD+ ini dengan beberapa alasan yang menjadi motivasi. Luasnya area hutan Indonesia dapat membuahkan pengaruh yang tidak kecil dalam program REDD+. Dengan aktifnya Indonesia dalam program-program REDD+, dapat memberikan posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang cukup tinggi dalam negosiasi di bidang lingkungan. Kuatnya peran Indonesia dalam program ini akan membuat Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam negosiasi tersebut.